BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari 38 Provinsi dengan total penduduk 273,52 juta jiwa dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Banyaknya jumlah penduduk dalam suatu negara akan memberikan dampak kepada perekonomian negaranya baik dampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak positif yang didapat adalah meningkatnya pendapatan negara yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hal ini terjadi apabila masyarakatnya tergolong memadai. Namun dampak negatif yang didapat negara apabila masyarakatnya tergolong sebagai masyarakat miskin maka akan memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan pekonomian dan menjadi masalah dalam suatu negara.

Tingginya angka kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Dalam konteks pembangunan suatu daerah, kemiskinan juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi, serta

keberhasilan upaya pembangunan pemerintah di wilayah tersebut (Oktaviana dkk., 2021)

Menurut penelitian oleh (Maipita, 2014), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Bappenas, lembaga perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, juga mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya dalam mengembangkan dan menjaga kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2021). Hak-hak dasar tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Selain itu, hak dasar juga mencakup rasa aman dari ancaman atau perlakuan kekerasan, serta akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi. Kemiskinan juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membatasi potensi pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah.

Pemerintah dan organisasi internasional telah memprioritaskan upaya untuk mengatasi kemiskinan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif meliputi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pemberdayaan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Maryani & E.Nainggolan, 2019). Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, fasilitas, dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat muncul sebagai respons terhadap kegagalan dan harapan. Kegagalan tersebut merujuk pada kurangnya hasil dari model-model pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan isu lingkungan yang berkelanjutan. Namun, ada harapan karena terdapat alternatif pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi

Menurut Sumodiningrat didalam peneletian (Rifa'i, 2013), mengatakan bahwa Upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua hal yang bisa di aplikasikan pada masyarakat, yaitu bantuan dana sebagai modal usaha dan pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan. Adanya hal tersebut memiliki tujuan agar masyarakat miskin bisa diberdayakan dan menurunkan angka kemiskinan.

Dalam Islam, pembangunan ekonomi mengacu pada proses menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat empat tujuan utama dalam ekonomi pembangunan Islam, yakni memastikan pemenuhan

kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta mengembangkan dan menjamin aspek spiritualitas. (Bank Indonesia, 2021, hlm. 132). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi :

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗهُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗاِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Artinya : "*dan kepada kaum samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)*." (Q.S Hud: 61)

Ayat tersebut dengan tegas menyampaikan bahwa tujuan utama kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk menjadikannya sejahtera. Tugas dan tanggung jawab ini dianggap sebagai kewajiban bersama bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Secara aksiologis, manusia itu memiliki dimensi sebagai makhluk yang berkeinginan atau bercita-cita yang terbaik. Terbaik dalam hal ini berarti "yang utama" artinya memberikan derajat yang tinggi bagi manusia, maupun terbaik dalam arti "yang indah" artinya memberikan kepuasan bagi manusia karena tidak ada manusia yang menginginkan keburukan (Ansharullah, 2019, hlm. 104). Semua individu memikul tanggung jawab sebagai khalifah atau pemakmur di panggung dunia. Pentingnya pemakmuran mencakup tanggung jawab untuk merawat dan memelihara bumi serta kehidupan di dalamnya. Dalam konteks ini, setiap individu dianggap sebagai wakil Tuhan yang

bertanggung jawab atas pengelolaan bumi dan segala isinya. Dengan demikian, konsep khalifah menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam dan memastikan kesejahteraan umat manusia dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. (Yaqin, 2015). Upaya yang bisa diambil oleh pemerintah dalam memakmurkan masyarakatnya adalah melalui pembangunan dalam sektor ekonomi di temapat yang rentan akan kemiskinan seperti pedesaan yang dimana sektor ini akan membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada jauh dari jangkauan**.**

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan peraturan yang mengatur mengenai pemberdayaan dan pengembangan desa di Indonesia. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta turut serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 (Agustina, 2019, hlm. 35). Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah tentang dana desa. Dana desa merujuk pada alokasi anggaran yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat

desa dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait pembangunan lokal. Dana ini dianggap sebagai sumber pendapatan yang penting bagi desa-desa untuk melaksanakan program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diprioritaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dari anggaran negara, desa juga dapat mengisi pemasukan atau pendapatan desa dari PAD (Pendapatan Asli Desa) seperti hasil usaha, asset, swadaya dan lain lain (Adib, 2020, hlm. 38). Sehingga alokasi dana desa mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa dan digunakan untuk memperkuat potensi lokal serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Salah satu bentuk alokasi dari dana desa yaitu program padat karya tunai desa (PKTD). Padat Karya adalah salah satu bentuk pengembangan yang berbasis masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia (Nagamatsu, 2014, hlm. 165). PKTD merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disusun dengan menggunakan dana desa. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar dan memberikan honorarium (upah) secara langsung kepada tenaga kerja yang terlibat, baik dalam skala harian maupun mingguan. Walaupun PKTD merupakan program yang hampir mirip dengan BUMDES namun kedua program tersebut memiliki perbedaan yang

signifikan dalam fokus utama program, yang mana BUMDES lebih berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi di tingkat desa, sedangkan PKTD berorientasi untuk menangani dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan tertentu.

PKTD dapat juga diartikan sebagai pola kerja dalam sebuah kegiatan yang 50 persen anggarannya untuk upah, seperti desa yang mengadakan BUMDES atau kegiatan lainnya yang dimana kegiatan tersebut sebagai PAD dalam desa maka pola PKTD dapat diterapkan didalam kegiatan tersebut dengan memperkejakan masyarakat dengan kriteria yang ada pada PKTD untuk diberdayakan.

Dengan adanya program padat karya tunai desa harapannya dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kriteria partisipasi warga desa atau masyarakat dalam pelaksanaan program padat karya tunai desa mencakup orang yang mengalami pengangguran, keluarga yang berada dalam kondisi miskin, dan warga marginal lainnya.

Setiap daerah tentu memiliki persentase tingkat kemiskinannya masing-masing salah satu daerah yang terdampak kemiskinan di Indonesia adalah kabupaten Kotabaru yang memiliki 198 jumlah desa dan 21 jumlah kecamatan dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. Persentase tingkat kemiskinan 3 tahun terakhir kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari data BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang dimuat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2020-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)		
	2020	2021	2022
KALIMANTAN SELATAN	187874	208118	195702
TANAH LAUT	14787	15862	13541
KOTABARU	**14597**	**16834**	**15065**
BANJAR	15124	18067	16711
BARITO KUALA	14251	16099	15055
TAPIN	5899	6925	6982
HULU SUNGAI SELATAN	12385	11466	10804
HULU SUNGAI TENGAH	15470	16770	16144
HULU SUNGAI UTARA	14718	16186	15497
TABALONG	14695	16128	15243
TANAH BUMBU	16832	18919	17216
BALANGAN	7064	8062	7825
KOTA BANJARMASIN	31307	34839	34009
KOTA BANJAR BARU	10745	11951	11610

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan

Pada tabel diatas tercatat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebanyak 14.597 jiwa penduduk atau setara dengan 4,22%, pada tahun 2021 sebanyak 16.834 jiwa penduduk atau setara dengan 4,86%, dan pada tahun 15.065 jiwa penduduk atau setara dengan 4,30%. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di daerah Kotabaru masih tinggi, yang mana total tingkat kemiskinan tersebut berasal dari beberapa desa yang mencakup dari kabupaten tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan penulis, salah satu desa yang menajalankan program padat karya tunai desa (PKTD) ini adalah desa Banua Lawas tepatnya di kabupaten Kotabaru. Bentuk dari PKTD di desa Banua Lawas adalah pengadaan kolam ikam. Dikatakan oleh Bapak Miyardi, S.E (kepala desa Banua Lawas) bahwa

pengadaan kolam ikan tersebut merupakan sebuah usaha yang ada pada desa yang menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD) yang sekarang sudah memasuki tahun ke 3 dan menghasilkan 4 kali panen/jual. Kolam ikan tersebut di mulai pada tahun 2020 dengan berhasil memperdayaan sebanyak 10 orang pekerja yang diambil dari masyarakat miskin/kurang mampu. Yaitu 6 orang dipekerjaan diawal pembuatan kolam seperti, 3 orang pembersih lahan dan 3 orang pembuat sarana kolam. 4 orang lainnya dipekerjaan setelah kolam sudah terealisasi sebagai pemelihara kolam. Namun memasuki tahun ke 2 dikatakan adanya pemunduran 3 orang pekerja dikarenakan keterlambatan upah, sehingga saat ini PKTD di desa Banua Lawas ini menyisakan 7 orang pekerja yang masih bertahan. Akan tetapi didalam tujuan PKTD salah satunya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan namun fakta dilapangannya di desa Banua Lawas ini masyarakat yang bekerja di PKTD yang tergolong pengangguran dan ekonomi lemah tersebut memilih berhenti di program PKTD ini. Maka daripada itu berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan lebih lanjut yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam (Studi Kasus Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru)".

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan dari latar belakang yang memuat permasalahan, maka peneliti menarik sebuah penelitian yang disusun melalui rumusan masalah berikut yaitu :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi pembangunan islam terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi pembangunan islam terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai tambahan ilmu bagi pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.
   b. Serta,sebagai sumbangan pikiran yang bisa dijadikan refrensi bagi peneliti yang akan dilakukan lebih lanjut.
   c. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan serta wawasan mengenai masalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di desa Banua Lawas kabupaten kotabaru.
   b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan dan mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) di desa Banua Lawas kabupaten kotabaru.
   c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan evaluasi atas terselenggaranya program yang dijalankan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan.

E. Definisi Operasional

Peneliti membuat definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan maksud dari penelitian ini,dianataranya yaitu :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi atau arti kata pemberdayaan adalah proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Kata dasar dari pemberdayaan adalah "daya". Dalam KBBI, kata "daya" memiliki beberapa makna, seperti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan, tenaga, muslihat, akal, ikhtiar, upaya, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya dan meningkatkan mutu kehidupannya. Adapun pemberdayaan masyarakat yang di tulis peneliti tertuju kepada masyarakat miskin di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru, yang diberdayakan melalui program pemerintah yang bernama padat karya tunai desa (PKTD).
2. Padat karya tunai desa (PKTD) merupakan salah satu program yang diprioritas pemerintah dalam menyalurkan dana desa ke tengah masyarakat (Saeful, 2020, hlm. 31). PKTD juga bisa diartikan suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada pengembangan infrastruktur pedesaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan merencanakan sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam hal ini bentuk PKTD yang di bangun di desa

Banua Lawas kabupaten Kotabaru adalah pengadaan kolam ikan dengan total jumlah pekerja didalamnya sebanyak 10 orang.

3. Ekonomi pembangunan Islam merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana mengatasi tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan dalam suatu negara atau wilayah dengan menerapkan prinsip-prinsip islam seperti keadilan sosial, persaudaraan, penghapusan riba, dan distribusi kekayaan yang adil. Dari sudut pandang ekonomi Islam, tujuan yang harus dicapai adalah peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pembangunan tidak hanya terkait dengan kepentingan dunia semata, melainkan juga harus terkait dengan keberlanjutan yang lebih abadi. (Purwana, 2013). Adapun pembangunan yang dimaksudkan peneliti adalah program padat karya tunai desa (PKTD) yang saat ini masih berjalan di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sutrisno (2022), Judul : Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan

(*Field Tesearch*) melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menayatakan bahwa Program PKTD sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa di Kecamatan Tambakromo secara permanen karena kegiatan yang dilakukan hanya sementara. Setelah aktivitas padat Karya Tunai selesai, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan kembali menganggur. Dampak ekonomi dari pelaksanaan Program Padat Karya Tunai sudah terlihat langsung di beberapa desa di Kecamatan Tambakromo, misalnya ketika peserta program PKT menerima upah, uang tersebut langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti program pemerintah yaitu padat karya tunai desa (PKTD) dengan subjek yang sama yaitu masyarakat. Persamaan lainnya ada pada metode yang digunakan yaitu jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya Sutrisno (2022) fokus penelitiannya ada pada program PKTD sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini ke pemberdayaan masyarakat melalui program PKTD. Dan perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian dimana Sutrisno (2022) melakukan penelitian di Kecamatan Tambakromo kabupaten Pati, sedangkan penulis melakukan penelitian di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.

2. Sarfan Tabo,dkk (2022), Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Mootilango. Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat observasi lapangan (*Exploration Field*) dengan teknik pengumpulan data melalui fakta-fakta objektif langsung dari segala macam gerakan yang dilakukan di pedesaan wilayah desa Mootilango.

   Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program padat karya tunai desa (PKTD) memberikan efek positif kepada warga yang terlibat didalamnya yang dimana warga mendapatkan keuntungan dari sisi posisi tanah dan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga dengan adanya hal tersebut maka warga di desa Mootilango yang terlibat dapat meningkatkan daya beli serta akan mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan, sehingga akan menaikan daya beli masyarakat di tenggah pandemic Covid19.

   Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai desa (PKTD). Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi perspektif yang dimana, Sarfan Tabo,dkk (2022) membahas secara umum tentang bagaimana pktd ini berjalan dalam memberdayakan masyarakat, sedangkan penulis membuat dua perspektif yaitu secara umum dan secara ekonomi pembangunan dalam islam. Selain dari pada itu metode penelitian yang dipilih juga berbeda dengan penulis yang dimana penulis akan melakukan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field*

Research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hal yang berbeda juga terdapat pada lokasi penelitian, dimana Sarfan Tabo,dkk (2022) melakukan penelitian di desa Mootilango, sedangkan penulis di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.

3. Rumsari Hadi Sumarto , Lukas Dwiantara (2019), Judul : Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf hidup masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat desa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui media cetak baik elektronik maupun cetak, jurnal dan buku-buku dilakukan penulis untuk melengkapi data

   Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana desa dapat menjadi Peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajad kehidupannya. Dana desa dapat membantu meningkatkan pembangunan dan kemampuan masyarakat di pedesaan, sehingga pedesaan menjadi lebih baik. Warga di pedesaan juga diberdayakan untuk mengurus dan menggunakan dana desa tersebut, sehingga mereka yang mendapatkan manfaat langsung dari dana tersebut.

   Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memiliki fokus penelitian kepada pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Adapun perbedaannya terdapat pada alokasi dana tersebut karena penulis menyebutkan hasil jadi dari dana desa yaitu program padat karya tunai desa (PKTD), metode penelitian juga menjadi pembeda dalam penelitian ini

yang dimana, Rumsari Hadi Sumarto , Lukas Dwiantara (2019) menggunakan metode kepustakaan mealui media cetak dan semacamnya, adapun penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi.

4. Irfan Sofi (2020), Judul : Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian ini penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif.Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi untuk validasi data melalui observasi,wawancara mendalam dan studi literature.

   Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) melalui dana desa berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin dengan menciptakan lapangan kerja untuk setidaknya 55 orang dalam setiap kegiatan. Desa-desa telah melakukan refokusing atau perubahan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan untuk memenuhi minimal 30 persen pemenuhan Harga Otonom Komoditi (HOK).

   Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti program pemerintah yaitu padat karya tunai desa (PKTD) dengan subjek yang sama yaitu masyarakat miskin serta jenis penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang

dimana Irfan Sofi (2020) terarah kepada implementasi padat karya tunai dana desa, adapun penulis memfokuskan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai desa (PKTD). Perbedaan berikutnya terdapat pada salah satu pengumpulan data yaitu Irfan Sofi (2020) menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literature, sedangkan penulis menggunakan dokumentasi serta perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian dimana Irfan Sofi (2020) melakukan penelitian di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, sedangkan penulis melakukan penelitian di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan lima bab yang berbeda yang terdiri dari :

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini menyajikan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang tentunya didukung oleh refrensi yang berhubungan dengan judul seperti mengutip dari buku, jurnal dan lain-lain. Yang mana pada bab II ini akan menguraikan tentang pemberdayaan masyarakat,program padat karya tunai desa (PKTD) dan ekonomi pembangunan Islam.

Bab III adalah bab metode penelitian. Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan hasil yang ingin diteliti. Pada bab ini

akan menyajikan informasi deskriptif yang meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV membahas penyajian data dan analisis. Dalam bab ini, hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa (PKTD) dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam di desa Banua Lawas kabupaten Kotabaru.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini yang akan memaparkan sebuah kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.